



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 (12) tentang “Pemerintah Daerah”, bahwa:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya maka diperlukan Aparat yang mampu dan berpotensi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pembangunan bangsa. Aparat Pemerintahan Desa merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keberhasilan pembangunan Desa sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Aparat dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, serta upaya peningkatan tata tertib hukum yang dapat diwujudkan melalui disiplin kerja yang baik. Dalam pelaksanaannya Aparat Pemerintahan Desa terdiri dari:

1. Pemerintah Desa, yang meliputi Kepala Desa beserta Perangkat Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan nama lain.

Hal ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Bab XI Pasal 200 ayat (1), bahwa: “Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”.

Adapun pelaksanaan penyelenggaraan desa dilaksanakan oleh semua anggota Aparat Pemerintahan Desa dengan sebaik-baiknya melalui disiplin kerja yang baik sehingga tujuan Pembangunan Nasional di bidang Pemerintahan Desa dapat tercapai.

Aparat Pemerintahan Desa merupakan abdi negara dan abdi masyarakat, maka diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, dan tindakan, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu harus ditunjang dengan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai Aparat Pemerintah yang mampu berdedikasi pada masyarakat, bangsa, dan negara dengan penuh tanggung jawab.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:237) mengutip, disiplin adalah tata tertib, ketaatan (kepatuhan) terhadap tata tertib tersebut. Disiplin juga dapat diartikan sebagai salah satu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, pemerintah dan peraturan yang berlaku. (Lemhanas, 1977:2).

Berbicara mengenai disiplin kerja dari Aparat Pemerintahan tidak akan terlepas dari pembenukan kesadaran hukum Aparat. Terbentuknya kesadaran hukum

Aparat pemerintahan tersebut dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pemahaman dan penataan Aparat Pemerintahan terhadap peraturan disiplin yang berlaku.

Soerjono Soekanto (1983:22) mengemukakan bahwa:

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka kesadarannya hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya.

Kesadaran akan hukum yang berlaku merupakan hal yang harus dimiliki oleh Aparat Pemerintahan Desa karena dengan menyadari dan memahami arti hukum maka akan mendorong seseorang untuk taat dan menghargai ketentuan hukum tersebut. Aparat Pemerintahan Desa dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik jika dia mampu mengendalikan tingkah lakunya dengan peraturan-peraturan yang sedang berlaku (James Drewar, 1969:110). Dengan pengetahuan yang dimiliki, Aparat Pemerintahan Desa harus mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, dia juga harus berhati-hati dalam melaksanakan segala tindakan karena apabila Aparat Pemerintahan Desa melakukan suatu kesalahan/kelalaian dalam bertugas dengan kata lain melanggar tata tertib yang berlaku maka ia akan mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya sikap disiplin harus diterapkan dan dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa hal yang dapat menunjang terjadinya kebiasaan disiplin, seperti yang dikemukakan oleh T. Rustandi (1996:69), sebagai berikut:

- a. Latihan-latihan yang mengembangkan pengendalian diri, karakter atau keadaan serta teratur, tertib dan efisien.
- b. Mengulang-ulang pekerjaan yang dilandasi dengan mematuhi aturan, tata tertib dan norma yang berlaku.

- c. Menerima akan kepatuhan terhadap kekuasaan dan kontrol, baik dari bawah maupun dari atas.
- d. Perlakuan yang menghukum dan menyiksa terhadap orang yang melanggar disiplin.

Pendapat T. Rustandi tersebut dapat dijadikan acuan dalam upaya pembentukan disiplin kerja yang baik di kalangan Aparat Pemerintahan Desa. Pembangunan Nasional di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan berhasil apabila seluruh rakyat Indonesia berperan aktif dalam setiap gerak dan langkahnya dengan dilandasi sikap disiplin dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kuncunya Aparat Pemerintahan Desa harus dapat berperan aktif dalam memajukan pembangunan Desa, sehingga anggotanya pun harus merupakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdisiplin melalui pendidikan dan pelatihan, penataan sistem kerja, penyediaan pelayanan kepada masyarakat serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka muncul permasalahan yang terjadi berkaitan dengan disiplin kerja Aparat Pemerintahan. Diungkapkan oleh Kolonel Laut (P) Soeparno (Majalah Dharma Wiratama 2003), yang mengatakan bahwa: "Masalah kemerosotan disiplin kerja di kalangan Aparatur Negara harus segera diatasi karena merupakan cerminan dari ketidakmampuan Aparatur Negara dan masyarakat, yaitu ketidakmampuan dalam melaksanakan Disiplin Nasional". Permasalahan yang terjadi antara lain disebabkan oleh:

- a. Masih kurangnya kesadaran para penyelenggara negara.
- b. Belum terjadinya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan".

Guna meningkatkan disiplin kerja di kalangan Aparat Pemerintah, maka perlu segera dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, yang menurut Kolonel Laut (P) Soeparno hal tersebut dapat diupayakan melalui:

- a. Pembudayaan disiplin dan etos kerja di kalangan aparatur negara. Segenap aparatur negara secara ikhlas dan dengan penuh kesadaran, mentaati semua peraturan dan meningkatkan etos kerja yang diwujudkan dengan peningkatan produktivitas, disertai rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai perwujudan watak dan sikap abdi Negara dan masyarakat, sehingga perilaku dan sikapnya tersebut dapat dijadikan teladan bagi masyarakat.
- b. Pembudayaan pengawasan. Bahwa pengawasan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kualitas, bagi suatu produk maupun aktivitas harus dibudayakan sehingga tidak sekedar pelengkap saja.
- c. Keteladanan. Menyadari bahwa masyarakat Indonesia masih berorientasi pada budaya paternalistik, maka sangat membutuhkan keteladanan dalam semua aspek kehidupan maupun kenegaraan.
- d. Penegakan hukum. Adanya kepastian hukum merupakan salah satu tolak ukur masyarakat untuk menilai bahwa pemerintah telah bersungguh-sungguh dalam menuntaskan kasus pelanggaran hukum.
- e. Pemberian penghargaan. Merupakan salah satu tujuan untuk membangkitkan kebanggaan dan menumbuhkan kepercayaan seseorang akan kemampuannya.
- f. Kaderisasi. Guna meningkatkan kinerja, produktivitas maupun kesinambungan organisasi, diperlukan kandidat-kandidat yang profesional serta memiliki moral dan disiplin yang baik.
- g. Pembenahan mekanisme kerja. Perlu dilakukan dalam rangka menciptakan:
  1. Efektivitas dan efisiensi.
  2. Kemudahan dalam pelayanan.
  3. Pedoman bagi aparat.
  4. Kepastian terhadap hak dan kewajiban.
- h. Berlanjut dan berkesinambungan. Bahwa upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan secara konsekuen, berlanjut dan berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas maka salah satu cara untuk meningkatkan disiplin kerja di kalangan aparat Pemerintahan Desa, yaitu dengan memberikan penghargaan bagi Aparat yang telah bekerja dengan disiplin kerja yang baik, tujuannya adalah untuk menimbulkan rangsangan terhadap etos kerja dan disiplin, sehingga Aparat termotivasi untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungannya. Di samping itu

penegakan hukum berupa sanksi harus sungguh-sungguh dilaksanakan di kalangan Aparat Pemerintahan Desa yang melakukan kesalahan/pelanggaran disiplin kerja.

Pada kenyataannya, selain dipengaruhi faktor pemahaman dan kesadaran hukum, faktor status sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa. Faktor status sosial ekonomi disini meliputi:

1. Status sosial, terdiri dari: tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh (formal dan non-formal) serta jabatan/kedudukan (dalam pekerjaan dan di lingkungan masyarakat).
2. Status ekonomi, terdiri dari: jenis pekerjaan (pekerjaan tetap dan pekerjaan/usaha sampingan) dan tingkat/jumlah pendapatan dari (pekerjaan tetap dan pekerjaan/usaha sampingan).

Keragaman individu-individu dalam masyarakat diakibatkan oleh pengaruh sosial, budaya, ekonomi atau agama, yang kemudian mendorong perbedaan tingkat status dalam masyarakat. Soerjono Soekanto (1990:265) mengemukakan bahwa: "Status adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial". Kedudukan pada dasarnya merupakan suatu kompleks dari kewajiban-kewajiban dan mengandung hak-hak dari fungsionaris yang menempatinya. Soerjono Soekanto (1990:265) menjelaskan lebih jelas mengenai kedudukan sosial, yaitu: "Kedudukan sosial adalah tempat seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya".

Kemudian, Ahmad Zein Arifin mengungkapkan bahwa status sosial ekonomi adalah: “Perbedaan tingkat keadaan ekonomi yang sesuai dengan pekerjaan, pendidikan, penghasilan dan apa yang dipunyainya”. Oleh karena itu tingkat status sosial ekonomi didasarkan pada harta milik, sumber pendapatan, jabatan pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

Keadaan ekonomi yang makin baik dan kedudukan sosial yang makin tinggi merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa. Kesadaran akan kedudukan dan peranannya sebagai Aparatur Pemerintahan membawa konsekuensi terhadap makin meningkatnya tuntutan dalam menjalankan kewajiban serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

Status sosial ekonomi berpengaruh terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa, dengan pertimbangan bahwa orang yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi memiliki kesempatan yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang berstatus sosial ekonomi rendah, baik apabila dilihat dari segi kesempatan, materi maupun informasi dan pengetahuan yang dimiliki. Orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi mempunyai peluang yang lebih besar karena mempunyai pengetahuan yang lebih baik dan memadai untuk memahami masalah-masalah sosial sehingga dapat melaksanakan segala kegiatan dengan lebih baik melalui perwujudan disiplin kerja yang baik pula.

Desa Pakutandang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, yang memiliki Aparat pemerintahan dengan latar belakang status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Di Desa Pakutandang pembinaan dan



penanaman disiplin kerja yang baik dinilai penting untuk dikembangkan pada setiap Aparat guna tercapainya keberhasilan pembangunan Desa. Pergantian Kepala Desa yang dilaksanakan tepatnya pada bulan Agustus 2003 lalu telah membawa dampak positif bagi kelangsungan pembangunan Desa. Melalui Kepala Desa yang baru ini disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa Pakutandang mengalami peningkatan yang cukup baik mulai dari disiplin waktu hingga disiplin dalam melaksanakan tugas dan mentaati tata tertib yang berlaku. Oleh karena itu mengingat besarnya pengaruh status sosial ekonomi terhadap pembentukan disiplin Aparat Pemerintahan Desa, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaruh status sosial ekonomi terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa.

Secara umum disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa Pakutandang dapat dilihat dari keberaturannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari, misalnya kedisiplinan dalam kehadiran di kantor, kedisiplinan dalam mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku, kedisiplinan dalam menerima tugas dari atasan, kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan dalam menjalankan tugas kedinasan, dan lain-lain.

Bertitik tolak dari keterangan singkat tersebut maka penulis akan mengangkat dan meneliti masalah tersebut dengan judul: **“Suatu Kajian Mengenai Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Disiplin Kerja Aparat Pemerintahan Desa”**.

## **B. Rumusan dan Pembatasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “Sejauhmana pengaruh status sosial ekonomi terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa”

### **2. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya ruang lingkup masalah yang berkaitan dengan penelitian, maka penulis merumuskan permasalahannya kedalam sub pokok masalah sebagai berikut:

- 1) Adakah pengaruh yang berarti antara status sosial ekonomi (X) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y) ?
- 2) Bilamana ada, berapa besar pengaruhnya secara statistik ?
- 3) Adakah pengaruh yang berarti antara status sosial (X1) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y) ?
- 4) Bilamana ada, berapa besar pengaruhnya secara statistik ?
- 5) Adakah pengaruh yang berarti antara status ekonomi (X2) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y) ?
- 6) Bilamana ada, berapa besar pengaruhnya secara statistik ?
- 7) Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara status sosial (X1) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y) dengan status ekonomi (X2) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y)?
- 8) Bilamana ada, berapa besar perbedaan pengaruh tersebut secara statistik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara nyata mengenai, “Sejauhmana pengaruh status sosial ekonomi terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa”

### **2. Tujuan Khusus**

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Pengaruh antara status sosial ekonomi (X) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y)
- 2) Besarnya pengaruh tersebut secara statistik, jika diketahui ada pengaruhnya.
- 3) Pengaruh antara status sosial (X1) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y)
- 4) Besarnya pengaruh tersebut secara statistik, jika diketahui ada pengaruhnya
- 5) Pengaruh antara status ekonomi (X2) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y)
- 6) Besarnya pengaruh tersebut secara statistik, jika diketahui ada pengaruhnya.
- 7) Mengetahui perbedaan pengaruh antara status sosial (X1) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y) dengan status ekonomi (X2) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y)?

- 8) Besarnya perbedaan pengaruh tersebut secara statistik, jika diketahui ada pengaruhnya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan dapat bermanfaat baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat umum. Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis secara teoritis maupun praktis mengenai pengaruh status sosial ekonomi terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa ditinjau dari latar belakang status sosial ekonomi, yang meliputi faktor pendidikan, kedudukan/jabatan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan informasi baik kepada masyarakat maupun kepada Aparatur Pemerintahan, tentang pengaruh status sosial ekonomi terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa. Sehingga dapat memperkaya dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi salah penafsiran dan untuk memperoleh suatu kesatuan dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah dalam judul penelitian ini:

1. Suatu

Hal; perihal; mengenai; dalam penelitian ini diartikan sebagai satu topik masalah.

2. Kajian

Merupakan bahasan; pembahasan. (Drs. Yandianto 1997:227)

3. Mengenai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “kena pada sasaran; menyentuh tepat kena pada sasaran”. Dalam hal ini diartikan bahwa kajian/pembahasan mengena pada sasaran/tujuan yang hendak dicapai.

4. Pengaruh

Merupakan faktor yang mempengaruhi suatu hal; bersifat mempengaruhi, dalam penelitian ini adalah “pengaruh status sosial ekonomi terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa”.

5. Status

Tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial (Soerjono Soekanto 1990:265).

6. Status sosial

Tinggi rendahnya prestise yang dimiliki seseorang berdasarkan posisi yang dipegang seseorang dalam suatu sistem sosial (W.S. Winkel, 1983:37).

7. Status ekonomi

Tinggi rendahnya prestise yang dimiliki seseorang berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan harta benda yang dimiliki.

#### 8. Terhadap

Mengenai pada hal; tertuju pada .....

#### 9. Disiplin

Disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan (Thomas Gordon 1996:33).

#### 10. Kerja

Kerja diartikan sebagai “kegiatan melakukan sesuatu yang diperbuat; sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian: ~nya di pemerintahan daerah” (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

#### 11. Aparat

Merupakan “perangkat; alat; instansi; pemerintah” (Drs. Yandianto, 1997:22).

#### 12. Pemerintahan

Merupakan: “Suatu sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik serta bagian-bagiannya yang bisa juga diartikan sebagai sekelompok orang secara dewasa bersama-sama memiliki tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan terbatas”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan kata lain pemerintahan merupakan proses, perbuatan; cara memantau, segala urusan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

### 13. Desa

Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri; kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; udik; dusun; tempat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

## **F. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis. Hal ini dikarenakan penelitian ini berkenaan dengan peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi sekarang. Selain bertujuan untuk memperoleh jawaban tentang permasalahan yang sedang terjadi data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Metode deskriptif ini tentunya dengan pertimbangan bahwa masalah yang menjadi kajian penelitian adalah untuk memaparkan tentang pengaruh status sosial ekonomi terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa pada saat sekarang dan bersifat aktual.

Hal ini didasarkan pada pendapat Nana Sudjana dan Ibrahim (1989:64) yang mengemukakan bahwa:

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang, dengan perkataan lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

Sesuai dengan maksud penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pencatatan dan pengolahan data secara nyata dalam bentuk angka serta menggunakan penghitungan statistik.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Angket**

Yaitu dimaksudkan untuk melengkapi data, dengan mempergunakan angket berupa pertanyaan yang diajukan melalui angket terbuka, angket tertutup dan angket skala sikap yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian serta pengetahuan dan pengalaman responden.

### **b. Wawancara**

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung antara penyidik dan responden. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi secara langsung tentang masalah yang akan diteliti untuk melengkapi dan memperkaya data.

### **c. Observasi**

Yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati kegiatan Aparat Pemerintahan Desa secara langsung ke lokasi penelitian, untuk melihat dan mendengarkan sumber data dengan tujuan agar dapat memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas tentang disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



#### **d. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi**

Studi kepustakaan yaitu membaca dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian sehingga diharapkan dapat memperoleh data secara teoritis sebagai penunjang penelitian. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan konsep-konsep sebagai pedoman dan pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data-data aktual yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan yang selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji dokumen-dokumen, surat kabar dan file-file dengan topik masalah yang diteliti untuk memperoleh bahan dan sumber yang bersifat teoritis.

#### **G. Anggapan Dasar dan Hipotesis**

##### **1. Anggapan Dasar**

Setiap penelitian ilmiah selalu memiliki anggapan dasar sebagai titik tolak pemikiran. Sebagaimana dikemukakan oleh Winarno Surachmad (1980:97) bahwa: "Anggapan dasar merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik".

Adapun yang dijadikan anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Status sosial ekonomi yang lemah sangat berkorelasi dengan partisipasi rendah, bahkan juga dengan tingkat kedudukan kepemimpinan yang rendah dalam suatu organisasi. (Althoff dan Paul B. Horton, 1993:273).

2. Daya guna fungsional orang perorangan dalam hal pekerjaan, sebagai eksekutif, guru, ilmuwan, buruh biasa, atau buruh yang terampil, semua itu sangat mempengaruhi dan menentukan status. (Schulte Nordholt, 1982:133)
3. Pendapatan (income), pendidikan dan status merupakan faktor penting dalam proses partisipasi, atau dengan kata lain, sehingga dengan pendapatan tinggi, yang berpendidikan lebih baik, dan yang berstatus tinggi, cenderung untuk lebih berpartisipasi daripada orang yang berpendidikan rendah. (Miriam Budiarjo, 1981:7)
4. Kelas sosial atau status sosial ekonomi secara kuat mempengaruhi pilihan karir, membantu membentuk nilai-nilai, harapan pendidikan dan aspirasi karir yang penting bagi perkembangan karir. (Splete dan Freeman dalam Eko Suprpto, 1994:57)
5. Kehidupan di Desa masih memperlihatkan ciri-ciri paguyuban dimana bisa kita lihat pada masyarakat yang demikian itu hubungan antara rakyat dengan pemimpin-pemimpin Desanya sangat dihargai. (Soerjono Soekanto 1982:291)

## 2. Hipotesis

Suharsimi Arikunto (1997:63) mengemukakan bahwa: "Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul". Maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh yang fungsional antara status sosial ekonomi (X) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y).

1.1 Terdapat pengaruh yang fungsional antara status sosial (X1) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y)

1.2 Terdapat pengaruh yang fungsional antara status ekonomi (X2) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y)

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh yang signifikan (bermakna/berarti) antara status sosial ekonomi (X) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y).

2.1 Terdapat pengaruh yang signifikan antara status sosial (X1) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y)

2.2 Terdapat pengaruh yang signifikan antara status ekonomi (X2) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y)

Hipotesis 3 : Terdapat bentuk hubungan/pengaruh yang linier antara status sosial ekonomi (X) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y).

3.1 Terdapat bentuk hubungan/pengaruh yang linier antara status sosial (X1) dengan disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y).

3.2 Terdapat bentuk hubungan/pengaruh yang linier antara status ekonomi (X2) dengan disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y).

Hipotesis 4 : Terdapat perbedaan pengaruh antara status sosial (X1) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y) dengan status ekonomi (X2) terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y).

## **H. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Untuk memberikan kejelasan dan menghilangkan kesalahpahaman, maka penulis akan memberikan definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini yang meliputi:

### **1. Variabel Bebas/Independent Variable (X)**

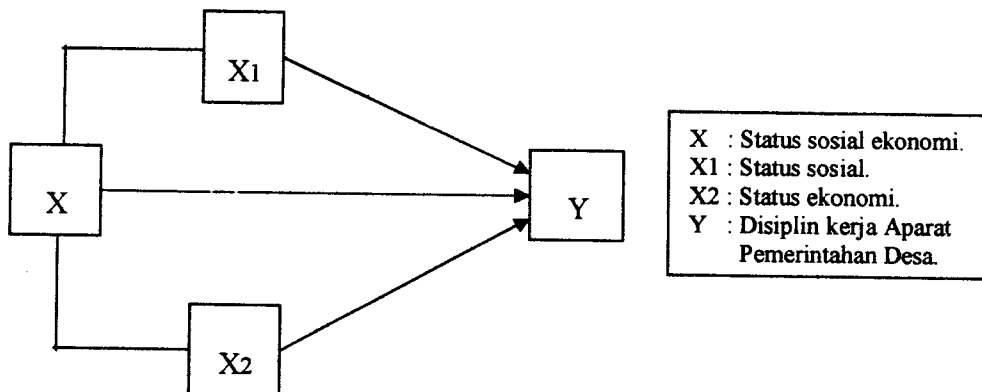
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi dan disebut juga sebagai variabel penyebab atau independent variable (X) (Suharsimi Arikunto, 1993:101). Dalam penelitian ini status sosial ekonomi adalah sebagai variabel bebas (X), yang ditekankan pada bagaimana pengaruh status sosial ekonomi terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa dengan latar belakang status sosial ekonomi Aparat yang heterogen, yang dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini terbagi dua paradigma yaitu status sosial sebagai variabel bebas 1 (X1) dan status ekonomi sebagai variabel bebas 2 (X2).

### **2. Variabel Terikat/Dependent Variable (Y)**

Variabel terikat merupakan variabel akibat yang disebut sebagai variabel tak bebas, variabel tergantung atau dependent variable (Y) (Suharsimi Arikunto, 1993:101). Maka sebagai variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa, adapun yang dimaksud dengan disiplin kerja dalam penelitian ini adalah sikap kerja yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku Aparat Pemerintahan Desa di antaranya ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku serta kemampuan dalam melaksanakan tugas/program kerja sehari-hari.

Paradigma penelitian dengan dua variabel bebas X (X1 dan X2) dan satu variabel terikat (Y) di atas digambarkan pada bagan sebagai berikut:

Bagan 1.1  
Hubungan Antar Variabel



Berdasarkan bagan di atas, diprediksikan bahwa variabel pengaruh status sosial (X1) dan status ekonomi (X2) merupakan variabel bebas yang turut memberikan kontribusi dalam munculnya sikap disiplin kerja pada Aparat Pemerintahan Desa (Y). Bila dikaitkan dengan judul penelitian ini, maka digambarkan variabel dan indikatornya sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Variabilitas Penelitian

No.	Variabel (X)/(Y)	Indikator
1.	Status sosial (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Tingkat pendidikan formal</li> <li>1.2. Pengalaman pendidikan non-formal Jabatan</li> </ol> </li> <li>2. Jabatan/pengalaman jabatan yang dimiliki               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Jabatan dalam bidang pekerjaan</li> <li>2.2. Jabatan di lingkungan masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
2.	Status ekonomi (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis pekerjaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Pekerjaan tetap</li> <li>1.2. Pekerjaan/usaha sampingan</li> </ol> </li> <li>2. Tingkat/jumlah pendapatan               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Pendapatan tetap</li> <li>2.2. Pendapatan sampingan</li> </ol> </li> </ol>
3.	Disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran dan kebiasaan berdisiplin dalam bekerja</li> <li>2. Ketaatan pada peraturan dan tata tertib yang berlaku</li> <li>3. Kepatuhan pada perintah kedinasan dan atasan yang berwenang</li> <li>4. Kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban</li> <li>5. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban</li> <li>6. Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan Anggota BPD (sesama Aparatur Pemerintahan Desa)</li> </ol>

### I. Populasi dan Objek Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

## **1. Populasi**

“Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian” (Suharsimi Arikunto, 1997:115). Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat Pemerintahan Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang.

Penentuan jumlah populasi ini dimaksudkan untuk menentukan sumber data dalam penelitian. Maka dengan adanya populasi ini, akan diperoleh informasi data yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

## **2. Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah seluruh Aparat/Perangkat Pemerintahan Desa yang berjumlah 24 orang. Sedangkan untuk melengkapi data-data yang diperlukan penulis mengambil sampel dari unsur masyarakat.

Dalam mengambil sampel dari masyarakat teknik sampling yang digunakan adalah sampel bertujuan atau purposive sample, yakni: “Pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti (Nana Sudjana, 1991:73)”.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap sejauhmana pengaruh status sosial ekonomi terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hal itu, guna melakukan penelitian maka dari jumlah populasi tersebut, penulis melakukan kriteria berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto (1993:107), bahwa:

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah populasinya besar atau lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15% hingga lebih.

Adapun yang dijadikan objek penelitian adalah: Aparat Pemerintahan Desa Pakutandang yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang Aparat (perangkat) Pemerintah Desa, dan 14 (empat belas) orang anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Desa (BPD).

Untuk lebih jelasnya maka penulis gambarkan rincian objek penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

*Populasi dan Objek Penelitian*

No.	Responden/Aparat Pemerintahan Desa	Jenis Kelamin L/P	Jumlah
1	Aparat (perangkat) Pemerintah Desa	L	10 orang
2.	Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)	L P	13 orang 1 orang
	Jumlah total		24 orang

Keterangan:

L : Laki-laki

P : Perempuan

Guna tercapainya tujuan, maka selain melakukan penelitian terhadap Aparat Pemerintahan Desa Pakutandang, penulis juga melibatkan unsur masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna melengkapi dan memperkaya data-data yang belum terungkap mengenai pengaruh status sosial ekonomi terhadap disiplin kerja Aparat Pemerintahan Desa. Untuk unsur masyarakat sampel diambil sesuai dengan kebutuhan kelengkapan data.